



**KEWENANGAN *MALIM KAMPUNG* DAN *HATOBANGON*
DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK RUMAH TANGGA
PADA MASYARAKAT TANJUNG MOMPANG
KEC. PANYABUNGAN UTARA MANDAILING NATAL**

Pembimbing:

**Dr. Muhammad Ramadhan, M.A
Dr. Zulham. M. Hum**

OLEH:

**RAHMAD EFENDI, M.Ag
19920416 201903 1 010**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M./ 1442 H**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Salawat dan salam selalu tercurah ke ruh junjungan alam- Rasul Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* umat manusia.

Saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saya mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Saya berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih dalam khazanah keilmuan Islam.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak-handai tolan yang turut berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini, Semoga bernilai ibadah dan menjadi amal saleh. Amin.

Medan 28 September 2020

Rahmad Efendi, M.Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT REKOMENDASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	14
B. Kedudukan dan Fungsi Hakam	22
1. Defenisi dan Dasar Hukum	23
2. Persyaratan Hakam	27
3. Persyaratan Hakam	33
C. Kewenangan Hakam dalam Penyelesaian Perselisihan Sumai Istri	38
D. Metode <i>Istinbat</i> Fuqaha tentang Kewenangan Hakam.....	44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian.....	58
C. Lokasi Penelitian	60
D. Subjek Penelitian.....	61
E. Sumber Data	62
F. Prosedur Pengumpulan Data	62
G. Analisis Data	63

BAB IV GAMBARAN UMUM DESA TANJUNG MOMPANG KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA KAB MANDAILING NATAL

A. Letak Dan Keadaan Geografis	65
B. Penduduk	67
C. Kondisi Sosial Keagamaan.....	67
D. Kondisi Sosial Pendidikan.....	71
E. Situasi Sosial Adat dan Budaya.....	75

BAB V ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN *MALIM KAMPUNG* DAN *HATOBANGON* PADA MASYARAKAT DESA TANJUNG MOMPANG PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

A. Formulasi Hakam Pada Masyarakat Tanjung Mompang.....	85
B. Kewenangan <i>Malim Kampung</i> dan <i>Hatobangon</i> Memutuskan Cerai Bagi Suami Istri yang Sedang Berselisih Pada Masyarakat Desa Tanjung Mompang	89

C. Pandangan Masyarakat Desa Tanjung Mompang Tentang Kewenangan Hakam Dalam Menceraikan Suami Istri Yang Sedang Berselisih.....	94
D. Faktor Yang Melatarbelakangi Pemahaman Masyarakat Desa Tanjung Mompang Tentang Kewenangan <i>Malim Kampung dan Hatobangon</i> dalam Memutus Cerai Pada Suami Istri Yang Berselisih.....	97
E. Analisa Terhadap Kewenangan Hakam dalam Memutuskan Cerai Bagi Suami Istri Yang Sedang Berselisih Pada Masyarakat Desa Tanjung Mompang Ditinjau Hukum Islam.....	104

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA	116
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan perkawinan.¹ Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga.² Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.³ Dalam kenyataannya terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian dalam hal ini suami menjatuhkan talak. Kata talak merupakan *isim masdar* dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliiqan*,⁴ jadi kata ini semakna

¹Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), h. 69.

²Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri"(Bandung: al-Bayan, 1999), h. 17.

³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,(Jakarta: UI Press, 1986), h. 99.

⁴Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 32.

dengan kata *tahliq* yang bermakna "*irsal*" dan "*tarku*" yaitu melepaskan dan meninggalkan.

Abul A'la Maududi mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan tersebut telah benar-benar rusak dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan. Itu berarti pintu perceraian harus

dibuka, walaupun tidak selebar yang dilakukan negara Rusia, Amerika, dan sebagian negara Barat.⁵

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya mubah. Adapun ketidaksenangan Allah SWT kepada perceraian itu terlihat dalam hadis dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو داود)⁶

Artinya: "Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh

⁵Abul A'la Maududi, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, Terj. Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", (Jakarta: anggota IKAPI, 1991), h. 41.

⁶Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz III, (Beirut Muassat al-Risalah, 2000), h. 142; lihat juga: Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Terj. Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, (Surabaya: Balai Buku,t.th), h. 539.

Allah ialah talak" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).

Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: *talak, khulu', fasakh, li'an dan ila'*.⁷ Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan istrinya dan hak *khulu'* kepada istri untuk menceraikan suaminya dan hak *fasakh* untuk kedua belah pihak. Dengan demikian maka yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara kedua suami istri, ialah *talak, khulu', fasakh*.⁸

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.⁹ Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir

⁷ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 2.

⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990), h. 110.

⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 209.

kehormatan.¹⁰ Islam mengajarkan jika terjadi perpecahan antara suami-istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya diadakan hakam (wasit) untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah hakam ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan.¹¹ Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu mengkhawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-

¹⁰Muhammad Alwi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nidham al-Usrah*, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, (Yogyakarta: Agung Lestari, 1993), h. 87.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970), h. 329.

laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. (QS. An-Nisa': 35)".¹²

Masalahnya, apakah hakam ini memiliki kewenangan atau dibolehkan menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Imam al-Syafi'i beserta para pengikutnya berpendapat bahwa kedua hakam itu tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada kedua juru damai.¹³

Pernyataan Imam al-Syafi'i di atas dapat dilihat dalam kitabnya *al-Umm*:

قال الشافعي فاذا ارتفع الزوجان المخوف شقا قهما الى الحاكم فحق عليه ان يبعث حكما من اهله وحكما من اهلها من اهل القناعة والعقل ليكشف امرهما ويصلها بينهما إن قدرا (قال) وليس له ان يأمرهما يفرقان إن رأيا إلا بامر الزوج ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها¹⁴

¹²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama 1986), h. 123.

¹³Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989), h. 74.

¹⁴Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dâr al- Kutub al-Ilmiah, tth), h. 208.

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : "Apabila dua orang suami istri yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam dari keluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki, yang termasuk orang yang saleh dan berakal/berfikir supaya keduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orang suami istri meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami".

Pernyataan Imam al-Syafi'i ini mengisyaratkan bahwa hakam tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih.

Lain halnya dengan yang terjadi pada masyarakat desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara, proses perceraian banyak yang dilakukan dibawah tangan. Dalam hal ini *hatobangon/ malim kampung* dan juga perwakilan dari kedua belah pihak keluarga yang menjadi hakam/mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga memiliki kewenangan untuk memutuskan cerai pada suami

istri yang berselisih jika tidak bisa didamaikan lagi. Fakta hukum seperti ini kerap ditemukan di masyarakat desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara karena pada umumnya perceraian yang terjadi pada daerah ini 70 % dilakukan di bawah tangan.¹⁵

Masyarakat desa Tanjng Mompang Kecamatan Panyabungan Utara merupakan masyarakat yang taat terhadap adat dan budaya yang telah mereka anut scara turun temurun sehingga tokoh agama dan tokoh adat (*Hatobangon*) masih sangat dihormati. Bagi masyarakat desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara *hatobangon* (tokoh masyarakat baik dalam masalah adat maupun agama) merupakan orang yang mampu dan bijaksana dalam memutuskan permasalahan terutama masalah perkawinan, sehingga jika ada terjadi masalah dalam rumah tangga penyelesaiannya akan dilakukan secara adat.¹⁶

¹⁵Mara Saman Hasibuan, Tokoh adat Desa Tanjung Mompang (mantan kepala desa) Tanjung Mompang, Wawancara Pribadi, Mei 2020.

¹⁶ Inpun Harahap, Tokoh Adat masyarakat desa Tanjung Mompang, Wawancara Pribadi, 05 Juni 2020.

Masyarakat desa tanjung Mompang merupakan keturunan dari suku Muara Sipongi, asal muasal masyarakat desa Tanjung Mompang adalah masyarakat yang pindah dari wilayah Muara Sipongi ke Tanjung Mompang. Mulanya masyarakat ini sedikit, namun lama kelamaan tumbuh dan bertambah banyak hingga menjadi sebuah Masyarakat dan desa. Masyarakat desa Tanjung Mompang adalah masyarakat yang tertutup, dan menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa Mandailing. Hampir semua perkawinan dilakukan antar sesama masyarakat, dengan kata lain tidak ada masyarakat desa Tanjung Mompang yang menikah dengan masyarakatdesa lain kecuali dalam beberapa tahun belakangan ini dan itupun masih dalam jumlah yang sangat sedikit.

Posisi Hakam pada masyarakat desa tanjung Mompang kecamatan Panyabungan Utara terdiri dari dari pihak laki-laki (suami) dan dari pihak perempuan (istri) ditambah dengan *malim kampung* dan *hatobangon*. Dalam pelaksanaanya perselisihan suami istri diselesaikan dalam

sebuah musyawarah dengan dihadiri oleh Hakam dari pihak suami dan istri akan berkumpul dengan suami istri yang sedang berselisih, jika tidak ditemukan solusi dalam perselisihan tersebut, selanjutnya hakam akan meminta *hatobangon* untuk turut mendamaikannya jika tidak bisa didamaikan lagi maka hakam akan memutuskan cerai antara suami dan istri.¹⁷

Faktor lain yang menyebabkan fenomena ini adalah karena daerah ini merupakan daerah pedalaman, desa ini terletak di pegunungan. akses masuk ke desa ini melalui kelurahan Mompang Jae dengan jarak tempuh 9 km dengan kondisi jalan tanah dan batu sedangkan armada pengangkutan yang digunakan ke desa ini *colt Diesel* 100 PS dan taff Badak. Kondisi ini dapat dipahami dengan kondisi jalan yang masih tanah dan bebatuan serta menanjak tinggi, sehingga tidak semua jenis mobil/angkutan bisa masuk desa ini. Kondisi geografis seperti ini menjadi salah satu penyebab sosialisasi bebrbagi aturan perundang-undangan khususnya

¹⁷ Malim Parlindungan, tokoh Agama masyarakat desa Tanjung Mompang,, Wawancara Pribadi, Tanjung Mompang, 05 Juni 2020.

dalam perkawinan sehingga tidak heran banyak perkawinan yang tidak di catat dan banyak perceraian yang dilakukan di bawah tangan.

Melihat pendapat Mazhab Syafi'i tentang tidak adanya kewenangan hakim dalam menceraikan suami istri yang berselisih dan fakta yang terjadi pada masyarakat desa Binanga tentang kewenangan hakim dalam menceraikan suami istri yang berselisih (*siqaq*), maka atas dasar inilah peneliti merasa penting untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul Kewenangan *Malim Kampung* Dan *Hatobangon* Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Utara Mandailing Natal.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *malim kampung* dan *Hatobangon* sebagai hakim dalam menceraikan

suami istri yang berselisih pada masyarakat desa Tanjung Mompang?

2. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya kewenangan *malim kampung dan hatobangon* dalam memutuskan cerai antara suami istri yang berselisih pada masyarakat desa Tanjung Mompang kecamatan Panyabungan Utara?
3. Bagaimana kewenangan *malim kampung dan Hatobangon* dalam memutuskan cerai antara suami istri yang berselisih pada masyarakat desa Tanjung Mompang ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan *malim kampung dan Hatobangon* sebagai hakam dalam menceraikan suami istri yang berselisih pada masyarakat desa Tanjung Mompang.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya kewenangan *malim kampung dan hatobangon* dalam memutuskan cerai antara

suami istri yang berselisih pada masyarakat desa Tanjung Mompang kecamatan Panyabungan Utara.

3. Untuk mengetahui kewenangan *malim kampung dan Hatobangon* dalam memutuskan cerai antara suami istri yang berselisih pada masyarakat desa Tanjung Mompang ditinjau dari hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam khususny dibidang perceraian yang menyangkut kedudukan hakam dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam terutama bagi masyarakat Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kab Mandailing Natal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Talak berasal dari Bahasa Arab, yaitu *al-thalâq*. Kata *al-thalaq* merupakan bentuk mashdar dari kata *thalaqa* (*fî'il mâdhiy*) - *yathluqu* (*fî'il mudhâri'*). Secara etimologi kata *al-thalâq* berarti: *lâ qayda 'alaiha wa kadzalıka al-khaliyyah*¹⁸ (tidak ada ikatan atasnya dan juga berarti meninggalkan). Dengan redaksi lain, 'Ali ibn Muhammad Al-Jurjaniy¹⁹ mengemukakan pengertian etimologi dari kata *Al-thalaq* itu dengan: *Izâlat al-qayd wa al-takhliyyah* (menghilangkan ikatan dan meninggalkan). Dalam pengertian etimologi, kata *al-thalâq* tersebut digunakan untuk menyatakan: "melepaskan ikatan

¹⁸ Ibn Manzbur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Ihya` al-Turats al-'Arabiyy, 1992), cet. Ke-2, Jilid 8, h. 188.

¹⁹ Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), cet. Ke-3, h. 141. Lihat j'`an Hamid Shadiq Qinyabiy, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ`, 'Arabiyy-Ingiliziy Divorce Repudiction*, (Riyadh: Dar al-Nafa`is, 1988), h. 281

secara *hissiy*, namun 'urf mengkhususkan pengertian *al-thalâq* itu kepada: "melepaskan ikatan secara ma'nawiy".²⁰

Sedangkan pengertian talak secara terminology telah dikemukakan pula oleh para ulama fikih. Menurut al-Sayyid al-Bakar (ulama Syafi'iyah), talak adalah:

حل عقد النكاح باللفظ اللّاتي وهي الطلاق والفراق
والسراح²¹

Artinya: Melepaskan akad pernikahan dengan menggunakan

lafal berikut: al-thalaq, al-firaq dan al-sarrah.

Adapun menurut Sayyid Sabiq, talak adalah:

حل الرابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية²²
Artinya: Melepaskan ikatan dan mengakhiri hubungan
perkawinan

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, baik dalam bentuk raj'iy maupun ba'in, dengan

²⁰Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 356.

²¹Al-Sayyid Abi Bakr (al-Sayyid al-Bakar), *I'ânât al-Thâlibîn*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.th.), Juz 4, h. 2.

²² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz 2, h. 206

lafal-lafal yang ditentukan, baik dalam bentuk sharih maupun kinayah sehingga antara kedua orang tersebut tidak dihalalkan lagi untuk "bersenang-senang"

Talak sebagai salah satu yang disyaratkan dalam agama Islam, tentunya telah mendapatkan legalitas oleh syara'. Dasar pensyariatan hukum talak tersebut terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, serta telah disepakati oleh Ulama dalam bentuk ijma' terhadap legalitasnya.

Diantara dasar hukum talak yang terdapat dalam Al-Quran adalah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا
فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ
بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Ayat diatas secara jelas menguraikan petunjuk atau aturan tentang waktu dan tata cara menjatuhkan talak, kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, meskipun yang di *khitab* dalam ayat tersebut hanya Nabi Muhammad SAW, namun menurut para *mufassir*, kandungan hukum yang terdapat dalam ayat itu tetap menjangkau dan berlaku bagi umatnya.

Begitu juga firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا

نِعَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُمُ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Dalam ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa seorang suami yang menjatuhkan kepada isterinya hendaklah tidak menganiaya isterinya dengan cara mengupayakan agar isterinya tersebut berada dalam masa 'iddah yang panjang. Ayat tersebut diatas merupakan kritikan keras terhadap kasus yang dipraktekkan oleh Tsabit Ibnu Basyar, seorang laki-laki dari golongan Anshar, dimana ia menjatuhkan talak isterinya namun ketika masa 'iddah-nya tinggal dua atau tiga hari lagi,

lalu ia rujuk kepada isterinya, kemudian ia kembali menjatuhkan talak isterinya untuk yang kedua dan begitu seterusnya sehingga isterinya tersebut selalu berada dalam masa '*iddah*'²³ selama sembilan bulan, dengan maksud menganiayanya. Oleh karena itulah sehingga Allah menurunkan ayat diatas. Demikian *asbâb al-nuzûl* ayat tersebut menurut Suday.²⁴

Dua ayat diatas secara eksplisit menjelaskan kepada kita bahwa talak memang disayriatkan dan mendapat legalitas dari *syar'i*. disamping dua ayat tersebut masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang talak, terutama yang cukup jelas adalah ayat-ayat yang menguraikan tentang masa '*iddah*'.²⁵

²³*Iddah* adalah suatu masa yang mana pada masa itu seorang perempuan menunggu dan terlarang untuk menikah setelah suaminya wafat atau menceraikannya. Lihat: Sabiq, h. 277.

²⁴Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 1, h. 154

²⁵Ketentuan tidak adanya '*iddah*' isteri yang belum disetubuhi terdapat dalam surat al-Ahzâb [33] ayat 49. '*Iddah*' perempuan yang ditinggal mati adalah empat bulan sepuluh hari ditetapkan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 234. '*Iddah*' perempuan yang masih haid dan tidak ditinggal mati adalah tiga kali quru' (menurut ulama Syafi'iyah berarti suci dan menurut ulama Hanafiyyah berarti haid) ditetapkan

Di antara hadits Rasulullah yang menjelaskan perceraian adalah:

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م: لا طلق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك (رواه ابن ماجه)²⁶

Artinya: "Diterima dari Jabir r.a, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan, dan tidak memerdekakan budak kecuali setelah ada kepemilikan" (H.R. Abu Yu'la dan Hakim men-shahih-kannya).

Hadits diatas menjelaskan bahwa talak dapat dijatuhkan setelah adanya akad pernikahan dan tindakan memerdekakan budak baru dapat berlaku dan mempunyai konsekuensi hukum apabila telah ada kepemilikan. Hal itu berarti bahwa talak mendapat legalitas dari syara'.

Begitu juga hadits Nabi SAW berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم ارساله)²⁷

dalam surat al-Baqarah [2] ayat 228. 'Iddah perempuan hamil (sampai melahirkan) ditetapkan dalam surat al-Thalâq [65] ayat 4.

²⁶Muhammad Fu`ad Abd al-Baqiy, *Sunan Ibn Mâjah*, (Beirut al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 1, h. 660

Artinya: "*Diterima dari Ibnu 'Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak*" (H.R. Abu Daud dan Ibn Majjah, al-Hakim men-Shahih-kannya namun Abu Hatim menyatakan mursal-nya).

Berdasarkan hadits diatas dapat dipahami bahwa meskipun Rasulullah SAW menyatakan bahwa talak itu adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT- sehingga menurut para ulama hanya boleh terjadi jika benar-benar terpaksa, namun walau bagaimanapun tetap mendapat legalitas dari syara'.

Di samping legalitas syara' yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah diatas, para ulama juga telah menyepakati dalam bentuk *ijma'* terhadap kebolehan menjatuhkan talak tersebut.²⁸ Legalisasi yang diberikan oleh syara' terhadap pensyari'atan talak itu juga didukung oleh dalil logika, dimana apabila kondisi antara suami dan isteri itu memburuk sehingga jika sepasang suami dan isteri itu dipaksa untuk

²⁷ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkâm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 225. Lihat Juga al-Baqiy, *op.cit.*, h. 650.

²⁸ Al-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, h. 357.

mempertahankan perkawinannya, justru akan menimbulkan ke-*mafsadat*-an dan ke-*mudharat*-an saja. Dalam kondisi seperti itu tidak logis mempertahankan perkawinan tersebut, sebab hanya akan memeperpanjang situasi buruk, *mafsadah* dan ke-*mudharat*-an tersebut.²⁹

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa meskipun menurut pendapat *ashah*, hukum asal dari talak itu adalah *mahzur* (dilarang) kecuali karena alasan-alasan yang sudah masuk kedalam kategori *hâjah*³⁰ namun walau bagaimanapun, talak memang disyari'atkan dalam islam berdasarkan beberapa ayat dan hadits Nabi SAW yang telah penulis kemukakan diatas.

B. Kedudukan dan Fungsi Hakam

1. Defenisi dan Dasar Hukum

Hakam artinya jurau damai. Jadi, hakamain adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami-istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui

²⁹*Ibid.*

³⁰Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 207

keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami-istri tersebut.

Secara terminologi, Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.³¹ Hakam juga diartikan sebagai juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami isteri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami isteri tersebut.³²

Hakamain yang ditetapkan Al-Qur'an adalah juru damai. Mereka mengupayakan mendamaikan buka upaya memperkeruh keadaan, apalagi dengan adanya juru damai malah membuat kedua belah pihak semakin menjelek-

³¹ Penjelasan Pasal 79 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

³² Irfan, *Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama*, Jurnal Edutech Vol. 4 No. 1 Maret 2018, h. 51.

jelekkan dan membuka rahasia masing-masing selama berumah tangga. Hal tersebut sangat dilarang oleh islam.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang arti hakam dalam QS. An-Nisa:35 tersebut.

- a) Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I serta pengikut keduanya berpendapat, hakam berarti wakil atau sama halnya dengan wakil. Hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada istri sebelum mendapat persetujuan dari suami. Begitu pula hakam dari pihak perempuan tidak boleh mengadakan khulu' sebelum mendapat persetujuan suami. Hakam hanya mewakili pihak yang berselisih dan bertugas menyampaikan keinginan-keinginannya, jika suami berkeinginan cerai maka hakam menyampaikan keinginan tersebut, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada juru damai. Alasannya adalah bahwa pada dasarnya talak tidak berada di tangan siapapun, kecuali suami atau seorang yang diberi kuasa olehnya.

Dan yang berhak mengangkat hakim adalah dari pihak suami dan istri.

- b) Menurut Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat, hakamain itu sebagai hakim sehingga boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya mengenai hubungan suami-istri yang sedang berselisih itu, apakah mereka memberi keputusan berdamai atau bercerai tanpa pemberian keluasaan atau persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi, kerelaan sorang suami sangat diperlukan disini. Alasan Imam Malik adalah apa yang diriwayatkannya dari Ali bin Abi Thalib ra. bahwa ia mengatakan tentang kedua juru damai itu:

إِلَيْهِمَا التَّقْرِقَةُ بَيْنَ لِرَّوَجَيْنِ وَالْجَمْعُ

Artinya: "Kepada kedua juru damai itu hak memisahkan dan mengumpulkan kedua suami-istri"

Ibnu sirin menyebutkan bahwa ‘Ubaidah berkata,”
Seorang suami dan istri datang kepada Ali ra, masing-masing dari mereka berdua membawa sekelompok orang banyak. Ali pun memerintahkan mereka untuk menunjuk

seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri. Setelah itu, Ali berkata kepada kedua hakim, "jika kalian memandang bahwa mereka berdua bisa bersatu, maka satukanlah, dan jika kalian memandang bahwa mereka berdua harus berpisah maka pisahkanlah. Sang istri berkata "aku ridho dengan kitab Allah swt, apa yang menjadi kewajibanku dan apa yang menjadi hakku. Dan sang suami berkata "adapun untuk berpisah, maka aku tidak mau. Lalu Ali berkata " Demi Allah, engkau berbohong, sampai engkau memutuskan seperti apa yang telah dia putuskan.

Dan menanggapi alasan yang di ungkapkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Imam Malik berbeda pendapat tentang kedua juru dalam menjatuhkan talak tiga. Dan yang berhak mengangkat hakim adalah dari hakim atau pemerintah.³³

³³ M.A Tihami, M.A., M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Cet. 1; Serang: Rajawali Pers), h. 190-192.

Jika kedua juru damai berbeda pendapat, salah satunya menetapkan talak satu sedang juru damai yang lainnya mengatakan talak dua. Maka putusan keduanya tidak dapat diambil, dan perlu mendatangkan seorang hakim lagi, hingga kedua juru damai tersebut bisa menghasilkan putusan yang sama. Jika tidak bisa mendapatkan juru damai dari keluarga masing-masing untuk menyelesaikan perselisihan pasangan suami-istri, maka mayoritas ulama, selain mazhab Maliki, membolehkan mengutus dua juru damai orang lain yang bukan keluarga suami atau istri. Putusan kedua juru damai itu bisa di terima, selama keduanya tidak berbeda pendapat.³⁴

2. Persyaratan Hakam

Para pakar hukum Islam sepakat tentang Perlunya pengangkatan hakamain dalam perkara syiqaq, tetapi mereka berselisih pendapat tentang hukum mengangkat hakam itu. Dalam kitab Syarqawi alat-Thahrir dikemukakan bahwa jika perselisihan antara suami istri dapat memuncak yakni terjadi permusuhan yang membahayakan maka perlu diangkat

³⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, "*Fiqhus Sunnah Lin Nisaa*", diterjemahkan Asep sobari, Lc., "*Fiqih Sunah untuk Wanita*. (Cet I; Jakarta: Darul Bayan Al-Haditsah), h. 751.

hakamain dan hukumnya wajib. Sedangkan Ibnu Rusyd berpendapat bahwa pengangkatan hakamain ini tidak wajib tetapi jawaz (boleh).

Pendapat yang terakhir inilah yang diikuti oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sayid Sabiq tidak mensyaratkan hakamain itu dari keluarga istri. Adapun perintah mengangkat hakamain dari pihak keluarga suami istri sebagaimana disebutkan dalam ayat 35 surat an-Nisa' itu adalah bersifat anjuran saja, karena keluarga dipandang lebih mengetahui situasi rumah tangga pihak yang berselisih itu. Tetapi pengarang *Syarwani alat Tuhfah* mensunahkan pengangkatan hakam itu dari pihak keluarga dari suami dan istri, dan yang mengangkat itu hakim. Pengangkatan itu dilaksanakan apabila perselisihan dan pertengkaran suami istri sudah sangat memuncak dan membahayakan kelangsungan kehidupan rumah tangganya.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (2) hakam tersebut tidak harus dari keluarga suami istri, diperbolehkan mengangkat hakam dari pihak lain. Apa

yang tersebut dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2) itu tidaklah menjadi persoalan asalkan dalam batas-batas pengertian bahwa rumusannya sengaja diperluas oleh pembuat Undang-undang dengan tujuan agar rumusan dalam ayat 35 surat an-Nisa' dapat dikembangkan untuk menampung berbagai problem dalam kehidupan masyarakat sepanjang dalam batas- batas acuan jiwa dan semangat yang terkandung dalam ayat tersebut.³⁵

Kedua hakam tersebut adalah dua orang laki-laki yang merdeka, adil, dewasa, memiliki pemahaman dan ilmu untuk menyatukan dan memisahkan; karena keputusan hukum membutuhkan pendapat dan penilaian. Kedua hakam ini bisa jika bukan berasal dari keluarga pasangan suami-istri. Yang paling utama adalah jika keduanya berasal dari keluarga suami dan istri karena kekerabatan bukan menjadi syarat dalam hukum dan perwakilan. Keduanya harus memiliki niat untuk memperbaiki. Keduanya juga harus memiliki ucapan yang lembut, bersikap fair, dan memiliki

³⁵ Abdul Manan, *Penerapan*, h. 409.

rasa keinginan serta rasa khawatir. Kedua rasa ini jangan sampai hanya dimiliki oleh salah satu pihak tanpa dirasakan oleh pihak yang lain, agar keduanya dapat lebih mudah disatukan.

Hakamain atau juru damai harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a) Baligh dan berakal
- b) Telah mengalami hidup berumah tangga
- c) Bersikap adil dan tidak berat sebelah
- d) Memberikan nasihat-nasihat kepada kedua belah pihak untuk mendamaikan bukan memperkeruh suasana sehingga konflik semakin menjadi-jadi
- e) Berwibawa dan disegani oleh kedua belah pihak
- f) Membela pihak yang teryindas berdasarkan bukti-bukti yang kuat
- g) Tidak melakukan pemerasan, penipuan dan sejenisnya kepada pihak yang membutuhkan jasanya.³⁶

³⁶ Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Fiqh Munakahat* 2. (Cet.VI; Bandung: Pustaka Setia), h. 53.

Mazhab Hanafi berpendapat, kedua hakim mengajukan keputusan yang mereka inginkan kepada qadhi. Dan yang meniatuhkan perceraian dengan talak ba'in adalah qadhi, berdasarkan laporan keduanya. Kedua hakam tidak memiliki hak untuk memisahkan kecuali jika kedua suami istri menyerahkan hal ini kepada keduanya.³⁷ Sehingga untuk menjadi hakam memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Berlaku adil antara pihak yang berperkara
- b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami isteri dengan ikhlas
- c. Disegani oleh kedua pihak suami atau istri
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.³⁸

Insyaflī mengutip pendapat dari Syeikh Jalaluddin Al-Mahally yang mengatakan bahwa disyaratkan kedua Hakam itu merdeka, '*adalah* (jujur) serta punya pengetahuan tentang

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam wa Adillatuhu*, Terj. Jilid 9 (Gema Insani-Darul Fikir: Jakarta, tt), h.308.

³⁸ *Ibid.*, h. 309.

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya”.³⁹ Insyafli menambahkan bahwa syarat yang perlu mendapat perhatian kita adalah syarat terakhir yakni punya pengetahuan tentang tugas-tugas hakam. Dari sini dapat kita fahami bahwa para Mediator di Pengadilan, lebih memenuhi syarat, dari segi punya pengetahuan dan kemampuan sebagai hakam.⁴⁰

Tentang berapa jumlah hakam yang ideal, pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak menentukan secara rinci, hanya menyebut seorang atau lebih dari keluarga masing-masing suami istri atau boleh juga orang lain ditunjuk untuk menjadi hakam. Ketentuan ini adalah sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh ayat 35 surat an- Nisa' yakni sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Meskipun sebaliknya ditunjuk beberapa hakam, tetapi secara kasuistik tidak menutup kemungkinan menunjuk seorang hakam saja. Hal ini dengan pertimbangan semakin banyak orang yang ikut campur, semakin kacau

³⁹ Irfan, *Fungsi Hakam*, h. 54.

⁴⁰ Insyafli, *Integrasi antara Mediasi dan Hakamain min Jihatil Hakim*, www.badilag.net, h. 3.

permasalahannya dan dalam hal yang demikian lebih efektif apabila hakam hanya mencari upaya penyelesaian perselisihan saja, bukan untuk mengambil keputusan dalam perkara yang sedang diadili oleh Majelis Hakim itu.

3. Fungsi dan Tugas Hakam

Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.⁴¹ Itulah sebabnya jika antara suami isteri terdapat pertentangan pendapat dan pertengkaran yang memuncak sehingga kedua belah pihak tidak mungkin dapat mengatasinya dan tidak mungkin pula mendamaikannya sendiri, maka dapat diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak isteri. Kasus krisis rumah tangga yang memuncak ini dalam istilah fiqh disebut *syiqaq*.⁴² *Syiqaq* mengandung arti

⁴¹ Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nidham al-Usrah*, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, (Yogyakarta: Agung Lestari, 1993), h. 87.

⁴² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), h.

pertengkaran, kata ini bisaanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suamiistri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbulbila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mestidipikulnya. Bila terjadi konflik keluarga seperti ini, Allah SWT. member petunjuk untuk menyelesaikannya.⁴³

Makna *syiqaq* adalah retak. Jadi *syiqaq* cenderung sebagai predikat bagi hubungan ikatan perkawinan yang sedang berlangsung. Hubungan itu sudah tidak pada keadaan yang diharapkan dan dapat diberi poin negatif. Dari predikat negatif ini sering mengarah kepada berakhirnya pada putusnya hubungan ikatan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, bila *syiqaq* dibahas dalam bagian dari bab mengenai pemutusan ikatan perkawinan terasa masih tepat. Walaupun sebenarnya dari sisi peristiwa hukum putusnya itu nanti bisa saja dalam bentuk *talaq*, dalam bentuk *khulu'*, dalam bentuk *fasakh*, dan bahkan bisa jadi ikatan perkawinannya tidak jadi

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 194.

putus melainkan tetap berlangsung. Keretakan hubungan ini ada yang disebabkan oleh dua pihak, yaitu pihak suami dan pihak istri secara bersama-sama.

Gambarannya ialah apabila terdapat perbedaan watak yang amat sukar dipertemukan, masing-masing bertahan dan tidak ada yang bersedia mengalah sama sekali, titik temu benar-benar jarang diperoleh sehingga kehidupan dalam rumah tangga ada saja gangguan ketenteramannya dan ketegangan tidak kunjung reda. Ada pula yang disebabkan hanya satu pihak, pihak suami misalnya seorang pria tidak bertanggung jawab sebagai pelindung, bertindak semena-mena hanya mau menang sendiri yang melekat di dalam pikirannya sehingga perlu dinasihati tetapi nasihat orang tidak didengar. Suasana rumah tangga demikian tentu menekan istri, dan sampai batas tertentu beban tekanan itu tidak kuat lagi ditanggung pihak istri. Atau sebaliknya, penyebab *syiqaq* justru datang dari pihak istri yang *nusyuz* (durhaka) yang sekalipun diupayakan perbaikannya melalui tahapan yang diajarkan al-Qur'an yaitu diberi nasihat, tidak

berhasil lalu dipisahkan tempat tidur, tidak berhasil lagi dipukul sebagai pengajaran tidak berhasil juga.⁴⁴

Firman Allah tentang *syiqaq* terdapat dalam ayat 35 surat an-Nisa':

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari ayat ini terdapat satu arahan *islah* (perdamaian) kepada pihak suami dan istri melalui penetapan atau pengangkatan dua orang *hakam*. Memang satu alternatif *islah* adakalanya harus cerai setelah dua orang *hakam* melakukan penelitian dan pengkajian permasalahan dua pihak suami dan istri. Tetapi alternatif lain bukan cerai mungkin sekali sebagai

⁴⁴Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), h. 146.

langkah *islah* yang dipilih dari kesepakatan dua orang *hakam*.⁴⁵

Fungsi atau tugas kedua *hakam* ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat permasalahan yang menimbulkan krisis itu, mencari sebab musabab yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali kedua suami isteri itu. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua *hakam* berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Atas prakarsa kedua *hakam* ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut. Perceraian dengan kasus *syiqaq* ini bersifat *ba'in*, artinya suami istri tersebut hanya dapat kembali melalui akad nikah yang baru.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, h. 147.

⁴⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, h. 168.

C. Kewenangan Hakam dalam Penyelesaian Perselisihan

Sumai Istri

Penunjukan *hakam* dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara dua belah pihak suami dan istri. Apabila karena sesuatu hal, *hakam* yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk *hakam* lainnya. Dalam hal ini, di Indonesia dikenal sebuah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas *hakam (arbitrator)* untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa, atau dalam hal-hal tertentu memberi nasihat calon suami istri yang merencanakan perkawinan. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi *hakam* tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi 'Atha' dan salah satu pendapat dari Imam al-Syafi'i, menurut satu hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah,

mengatakan bahwa kedudukan dua orang *hakam* itu adalah sebagai wakil dari suami istri.

Dalam kedudukan ini dua orang *hakam* tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri; keduanya telah dewasa dan cerdas; oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.⁴⁷

Golongan kedua terdiri dari Ali, Ibnu Abbas, al-Sya'bi, al-Nakha'iy, Imam Malik, al-Awza'iy, Ishak, dan Ibnu Munzir. Menurut mereka bahwa dua orang *hakam* itu berkedudukan sebagai hakim. Dalam kedudukan ini keduanya dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya baik tanpa persetujuan kedua suami istri, baik untuk

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Pengantar Hukum islam*, h. 196.

mendamaikannya atau menceraikannya dengan uang tebusan atau menceraikannya tanpa tebusan.

Alasan yang dikemukakan ulama ini adalah petunjuk ayat yang disebutkan di atas. Baik atas pendapat golongan yang mengatakan *hakam* berkedudukan sebagai wakil atau sebagai hakim, keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan syara' yaitu keduanya telah dewasa, sehat akalnya, laki-laki dan bersikap adil. Ini adalah syarat umum untuk yang bertindak bagi kepentingan publik. Dalam ayat memang disebutkan dua orang *hakam* itu satu dari pihak suami dan seorang lagi dari pihak istri. Namun apakah keduanya merupakan keluarga dari pihak masing-masing, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa kedua orang *hakam* itu tidak dipersyaratkan dari keluarga kedua belah pihak, namun sebaiknya bila keduanya dari pihak keluarga, karena dianggap lebih sayang dan lebih mengetahui persoalan dibandingkan dengan yang lainnya.⁴⁸

Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm* menyatakan:

⁴⁸ *Ibid.*, h. 196.

قال الشافعي قال تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا الآية . والله اعلم بمعنى ما اراد. فاما ظاهر الآية فإن خوف الشقاق بين الزوجين أن يدعى كل واحد منهما على صاحبه منع الحق ولا يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به ولا ينقطع ما بينهما بفرقة ولا صلح ولا ترك القيام بالشقاق, وذلك ان الله وجل أذن في نشوز المرأة والعطو والهجرة الضرب, ولنشوز الرجل بالصلح. فاذا خاف ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدة به ونهى اذا اراد الزوخ استبد الزوج مكان الزوج أن باخذ مما أتاها شيئا.

قال الشافعي فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما الى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكما من اهله و حكما من اهلهما من اهل الفتاعة زالعقل ليكشف امرهما ويصلحا بينهما عن قدرا.

قال وليس له أن يأمرهما يفرقان ان رأيا⁴⁹

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : Firman Allah Azza wajalla, yang artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan" (An Nisa : 35). Imam al-Syafi'i berkata : "Dan Allah lebih mengetahui dengan makna apa yang ia ingini. Adapun zhahir ayat maka kekhawatiran sengketa antara suami istri di mana masing-masing dari keduanya mendakwa bahwa temannya itu mencegah

⁴⁹ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth,h. 208.

hak dan salah seorang dari keduanya tidak berbuat baik terhadap kawannya dengan memberikan apa yang ia sukainya, dan tidak terputus di antara keduanya dengan sebab perceraian, tidak pula mendamaikan dan tidak pula meninggalkan kewajiban karena persengketaan itu. Yang demikian itu bahwa Allah Azza wa jalla mengizinkan dalam masalah *nusyuz* wanita untuk memberi nasihat, meninggalkan tempat-tidur dan memukul. Dan Allah mengizinkan karena *nusyuz* laki-laki untuk mengadakan perdamaian. Apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan ketentuan-ketentuan Allah maka tidak berdosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Dan Allah melarang bila laki-laki menginginkan menukar istri pada tempat istri untuk mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada istri. Imam al-Syafi'i berkata: "Bila dua orang suami istri yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam dari keluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki, yang termasuk orang yang saleh dan berakal/berfikir supaya keduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: "Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orang suami istri meskipun keduanya berpendapat demikian.

Pernyataan Imam al-Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau

istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak. Kedua hakam ini tentunya hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri. Hakam tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua hakam tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu.

D. Metode *Istinbat* Fuqaha tentang Kewenangan Hakam

Imam al-Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber-*istinbat*. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya

sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam al-Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al- Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.⁵⁰ Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan

⁵⁰ Imam al-Syafi'i, *al-Umm*. Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutub, Ijtima'iyah, t.th, h). 246.

tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut.

Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkat-tingkatan tersebut. Dalil atau dasar hukum Imam al-Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwafatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam al-Syafi'i pun menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.⁵¹

Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam, maka sebagai *istidlal* yaitu al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5. Imam al-Syafi'i meletakkan sunnah sahihah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam al-Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keteranganketerangan dalam al-Qur'an.

⁵¹ Syaikh Ahmad Farid, h. 362.

Sumber-sumber *istidlal* ⁵² walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. ⁵³

Imam al-Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Al-Sunnah yang dimaksud yaitu al-Sunnah yang memiliki derajat sahih. Pandangan Imam al-Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.⁵⁴ Imam al-Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah

⁵² *Istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, h. 588 dan 585. Menurut istilah menegakkan dalil untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash, ijma' ataupun lainnya atau menyebutkan dalil yang tidak terdapat dalam nash, ijma' ataupun qiyas. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 214.

⁵³ *Ibid.*, h. 239.

⁵⁴ Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, h. 32.

semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-istinbat-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.⁵⁵ Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.⁵⁶

*Ijma*⁵⁷ menurut Imam al-Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar

⁵⁵ Jaih Mubarak, h. 45.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhab Khalaf, '*Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, h. h. 45.

terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena ijma baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam al-Syafi'i menolak ijma penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.⁵⁸ Imam al-Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam al-Syafi'i berkata:⁵⁹

رأيهم خيرا لنا من رأينا لأنفسنا

Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan"

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam al-Syafi'i melakukan

⁵⁸ Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, h. 534.

⁵⁹ Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, h. 562.

ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukumhukum syari'at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam al-Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam al-Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah".⁶⁰

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam al-Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-rayu* yang sah

⁶⁰ *Ibid*, h. 482.

dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi *istinbat-istinbat* yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbat* yang lain selain qiyas.⁶¹

Ulama usul menta'rifkan qiyas sebagai berikut:

إلحاق امر غير منصوص على حكمه بام معلوم حكمه⁶²
لأشترأكه معه في علة الحكم

Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam *illat* hukum."

Dengan demikian Imam al-Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyas*. Sedangkan terhadap *istihsan*, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*,

⁶¹ *Ibid*, h. 482.

⁶² TM. Hasbi Ash Shiddieqy., *Hukum Islam*, h. 257.

juga disebutkan dalam kitab *Jima'ul Ilmi*, *al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam al-Syafi'i ialah bahwa setiap ijtihad yang tidak bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, *ijma'* atau qiyas dipandang *istihsan*, dan ijtihad dengan jalan *istihsan*, adalah ijtihad yang batal.⁶³ Jadi alasan Imam al-Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam al-Syafi'i adalah *masalah mursalah*. Menurut Imam al-Syafi'i, *masalah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.⁶⁴

Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya

⁶³ *Ibid*, h. 146.

⁶⁴ Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, h. 479.

atau pembatalannya.⁶⁵ Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam al-Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diadukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.⁶⁶

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan.⁶⁷ Dalam format kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab *al-UMM*, diantaranya adalah :

⁶⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, h. 84. Cf. Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, h.184.

⁶⁶ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 7, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth), h. 271-272.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 53.

1. *Al-Musnad*, berisi sanad Imam al-Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam al-Syafi'i.
2. *Khilafu Malik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.
3. *Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.
4. *Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan AH Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.
5. *Sair al-Auza'i*, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.
6. *Ikhtilaf al-Hadis*, berisi keterangan dan penjelasan Imam al-Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak

bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.

7. *Jima' al-'llmi*, berisi pembelaan Imam al-Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.

Dalam hubungannya dengan metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih, maka Imam al-Syafi'i menggunakan *istinbat* hukum yaitu al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. An-Nisa ayat 35).⁶⁸

⁶⁸Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: DEPAG RI, 1978), h. 123.

Dalam penafsiran Imam al-Syafi'i bahwa ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya hakam mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami istri untuk bercerai. Jadi apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang *hakam* sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak. *Hakam* ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat permasalahan yang menimbulkan krisis itu, mencari sebab musabab yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali kedua suami isteri itu. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua *hakam* berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya.

Atas prakarsa kedua *hakam* ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan

menetapkan perceraian tersebut. Perceraian dengan kasus *syiqaq* ini bersifat *ba'in*, artinya suami istri tersebut hanya dapat kembali melalui akad nikah yang baru. Adanya *hakam* itu adalah karena perceraian secara langsung bisa menimbulkan dampak. Dengan demikian, apabila antara suami istri terdapat perbedaan watak yang amat sukar dipertemukan, masing-masing bertahan dan tidak ada yang bersedia mengalah sama sekali. Hal ini berarti titik temu benar-benar jarang diperoleh sehingga kehidupan dalam rumah tangga ada saja gangguan ketenteramannya dan ketegangan tidak kunjung reda. Ada pula yang disebabkan hanya satu pihak, pihak suami misalnya seorang pria tidak bertanggung jawab sebagai pelindung, bertindak semena-mena hanya mau menang sendiri, maka disini pentingnya ada seorang *hakam*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrument adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,⁶⁹ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan fokus kajiannya, maka penelitian merupakan penelitian empiris. Sedangkan dari sudut datanya, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengumpulkan data-data dengan cara langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 194.

yang lebih akurat tentang objek yang menjadi penelitian penulis, dan supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis sendiri.

Dari sisi disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melihat perbuatan hukum sebagai fenomena social (*legal social reseach*), penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosial (*Sosial Oprouch*), yaitu bagaimana masyarakat pada realitasnya melaksanakan hukum Islam, khususnya dalam meneliti kewenangan malim kampung dan hatobangon dalam menyelesaikan perselisihan suami istri dalam perkawinan adat masyarakatdesa Tanjung Mompang kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

B. Pendekatan Penelitian

Dari sisi model penelitian (*mode of inquiry*) penelitian ini dilakukan dengan model penelitian kualitatif karena kajian ini untuk memahami fenomena berkaitan dengan pelaksanaan hukum perkawinan dalam suatu setting masyarakat yang alami, untuk memahami suatu fenomena berdasarkan data informasi yang diperoleh dari para

informan. Kemudian realitas yang multidimensi muncul dari situasi yang bervariasi dan kompleks.

Oleh karena itu suatu kajian terhadap suatu gejala sosial mesti dilakukan dengan menganalisis konteksnya dan ini dapat dilakukan hanya melalui pendekatan kualitatif yang merupakan metode penelitian yang menggunakan data-data berupa pandangan-pandangan tentang *study etnografi* (etnis) dalam perkawinan adat masyarakat suku Muara Sipongi ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Adapun pendekatan Etnografi adalah suatu uraian dan penafsiran terhadap budaya atau sistem kelompok sosial, peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup masyarakatnya.⁷⁰

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada masyarakat desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kab Mandailing Natal berdasarkan *purposive sampling* yaitu

⁷⁰ Iyan Apriani, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 78

sample yang di pilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau berdasarkan pertimbangan *Subyektivitas* penulis.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁷¹ Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan dan responden yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan adat masyarakat desa tanjung Mompang tentang kewenangan *hatobangon/ Malim kampung* sebagai hakam dalam proses penyelesaian permasalahan rumah tangga tinjauan dari hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi parameter yang dapat mengungkap hal di atas sehingga memungkinkan data dapat diperoleh. Parameternya adalah sebagai berikut:

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Cita Pustaka, 2002), h. 107.

- a. Mengetahui tentang konsep hakam dalam hukum Islam
- b. Merupakan panutan dalam masyarakat baik dibidang adat maupun Agama
- c. Terlibat dalam kasus penyelesaian perselisihan suami istri yang di putuskan bercerai
- d. masyarakat desa Tanjung Mompang kecamatan Panyabungan Utara yang secara langsung sebagai pelaksana kasus *perceraian di bawah tangan*

Dari parameter di atas, informan penelitian yang dianggap memenuhi karakteristik yaitu:

- kepala desa dan perangkat lainnya pada desa Tanjung Mompang Panyabungan Utara sebagai perwakilan pemerintah
- Kepala desa setiap desa penelitian
- *Malim* kampung dan *hatobangon* yang ada di desa Tanjung Mompang.
- Masyarakat desa Tanjung Mompang

Selanjutnya informan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Tanjung Mompang kecamatan Panyabungan Utara yang secara langsung sebagai obyek

E. Sumber Data

Sumber data penelitian ini di bagi dua, yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan dengan mengamati pemahaman dan pengamalan masyarakat Tanjung Mompang tentang kedudukan hakam dalam memutuskan cerai terhadap suami istri yang siqaaq.
- b. Data sekunder yaitu data yang mendukung dalam penelitian ini baik fiqh (mazhab Syafi'i) maupun Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya

langsung pada narasumber.⁷² Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan pihak-pihak masyarakat desa Binanga yang terkait dengan obyek dalam penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data penelitian ini dipergunakan cara pengumpulan data berupa pelacakan terhadap berbagai literatur baik kitab, buku-buku, jurnal dan penelitian yang terkait dengan permasalahan kewangan hakim, perselisihan suami istri dan lain sebagainya.

G. Analisis Data

Analisi dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus (deduktif) dan membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum (induktif), selanjutnya dipaparkan dengan bentuk

⁷² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo, 2003), h.231.

deskripsi (penyajian data yang mencoba menggambarkan keadaan yang sebenarnya).

BAB IV
GAMBARAN UMUM DESA TANJUNG MOMPANG
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA
KABUPATEN MANDAILING NATAL

A. Letak Dan Keadaan Geografis

Tanjung Mompang terletak di kaki pegunungan Bukit Barisan, sehingga struktur tanahnya tidak sepenuhnya datar, tetapi bergelombang dan berbukit-bukit. Jika dilihat dari model dasarnya, hampir seluruh kampung ini dan persawahannya berada pada sudut miring antara 10-40 derajat, dengan medan dan perbukitan yang terjal hingga hampir 80 derajat pada sudut miring, jadi bisa dipastikan bahwa mata air amat banyak di desa ini terutama di rura (lembah) bukit-bukitnya. Dari data Pemda Madina, luas desa Tanjung Mompang adalah sekitar 367,41 Ha..⁷³

Desa Tanjung Mompang merupakan daerah di bagian Utara dari kota Panyabungan. Jarak desa Tanjung Mompang dengan pusat pemerintahan kecamatan sekitar 11

⁷³Badan Statistik Mandailng Natal, *Madina Dalam Angka 2018*.

km dan jarak dengan kota kabupaten kurang lebih 23 km. Secara administratif Desa Tanjung Mompang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Barisan (Dolok Malea)
2. Sebelah Timur berbatasan perkebunan karet masyarakat desa Mompang jae (Dolok Tonga)
3. Sebelah Selatan/Barat Daya berbatasan dengan Dolok Jae
4. Sebelah Barat/Barat Laut berbatasan dengan Dolok Tuan⁷⁴

Sebagian besar di dominasi oleh lahan perkebunan karet (35%), perkampungan (40%), persawahan dan ladang (10%) dan sisanya adalah hutan dan semak belukar yang terutama di bukit-bukit di Dolok Malea. Walau secara geografis terletak di dekat garis khatulistiwa (01 derajat LU), musim hujannya adalah dari bulan Oktober-Maret dan

⁷⁴ Sumber data Administrasi Kecamatan Panyabungan Utara ,Tahun 2018.

kemarau di bulan April-September, namun seiring dengan pemanasan global sekarang ini, perubahan musim jadi tidak menentu.

B. Penduduk

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor kecamatan Panyabungan Utara, jumlah penduduk desa Tanjung Mompang adalah 1.811 jiwa dengan perincian laki-laki berjumlah 878 orang dan perempuan 933, sehingga jumlah. Sementara kepala keluarga (KK) berjumlah 362 KK.⁷⁵

C. Kondisi Sosial Keagamaan

Untuk menunjang aktivitas keberagamaan dan pemberdayaan masyarakat Tanjung Mompang, diperlukan sarana ibadah yang memadai dalam masjid, mushola dan langgar sebagai sarana sekaligus wadah untuk melakukan aktivitas keagamaan yang merupakan representasi dari satu bentuk keyakinan masyarakat terhadap kekuatan yang gaib.

⁷⁵ Data Domografi Kantor kecamatan Panyabungan Utara tahun 2018.

Di Desa Tanjung Mompang mempunyai sarana peribadatan yang berjumlah 3 unit yang terdiri dari 1 Masjid dan 2 Mushola, Sehingga dengan adanya tempat ibadah seperti ini mampu menjadi sarana sosial.⁷⁶

Secara keseluruhan jumlah masyarakat agama di Desa Tanjung Mompang 100% menganut agama Islam.⁷⁷ Keberadaan masjid dan mushola mempunyai arti penting sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian, belajar membaca dan menulis huruf Arab maupun untuk membicarakan persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas sosial keagamaan masyarakat Tanjung Mompang bersifat aktif dan dinamis dengan dibuktikan adanya program-program yang di selenggarakan dalam masyarakat.

⁷⁶ Hasil Observasi penulis pada desa Tanjung Mompang kecamatan Panyabungan Utara, 14 April 2020.

⁷⁷Data Domografi desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara 2018.

Kegiatan yang bersifat keagamaan dan belajar membaca al-Qur'an dapat dijumpai di rumah-rumah warga, antara lain rumah Ustadz Syukran Nasution, Ustadz Sulaiman, sedangkan menulis huruf Arab dan belajar ilmu agama dapat dijumpai di MDA Nurul Hidayah yang bertempat di halaman depan masjid Nur Al-Muttaqin. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan secara kontinyu bagi anak-anak dan remaja.⁷⁸

Kegiatan bagi anak-anak dalam belajar membaca dan menulis huruf Arab dan ilmu agama lainnya dilakukan sesudah shalat dzuhur ± pukul 14.30 s/d 17.30 wib. Untuk kalangan remaja berupa kegiatan pengajian rutin berupa membaca surah Yasin, takhtim dan tahlil dan kegiatan diskusi Tanya jawab yang dilaksanakan secara bergiliran antara rumah-rumah di desa Tanjung Mompang.

Kegiatan untuk orang tua adalah pengajian ba'da Magrib yang dilaksanakan setiap malam Kamis dengan penceramah dari kalangan tokoh agama di wilayah Tanjung

⁷⁸Hasil wawancara dengan Sulpan Lubis, Kepala desa Tanjung Mompang, 20 Juli 2020.

Mompang dan sekitarnya dan pengajian umum yaitu pengajian tafsir, fiqh dan ahlaq/tasawuf. Adapun materi yang disampaikan dalam pengajian tersebut adalah membahas isi dan kandungan dari ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis. Dengan adanya pengajian ini umat Islam Tanjung Mompang dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai kemampuan masing-masing.⁷⁹Dari kegiatan seperti ini mempunyai makna sosial yang cukup signifikan terhadap penumbuhan rasa persaudaraan sesama warga masyarakat.

Dalam artian yang lebih luas aktivitas agama di Desa Tanjung Mompang mempunyai dimensi sosial yang tidak semata menjadi rutinitas yang bersifat transenden semata, sehingga di sini eksistensi tempat ibadah, terutama masjid mampu menjadi wadah sosial dengan berbagai kegiatannya yang bersifat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat

⁷⁹Wawancara dengan Nakman Nasution, Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Mompang 17 Juli, 2020.

melalui berbagai agenda kegiatan yang berbasis di masjid sebagai pusat aktivitas sosial.

D. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Mompang rata-rata yang tamat / tidak tamat SD \pm 45%, SMP \pm 25%, SMA \pm 18% dan Sarjana/Akademi kurang dari 2%.⁸⁰ Setelah tamat SD, banyak anak-anak yang melanjutkan ke SLTP atau ke Pesantren atau tidak melanjutkan sama sekali, namun kebanyakan putus ditengah jalan,

Pendidikan pada masyarakat Tanjung Mompang pada umumnya hanya sampai ke tingkat sekolah dasar (SD).Walaupun melanjutkan kebanyakan hanya tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) jarang sekali ditemukan masyarakat yang sampai ke jenjang pendidikan tinggi setingkat Universitas.Untuk itulah maka pemberdayaan dibidang pendidikan yang mempunyai jangkauan yang sangat luas untuk dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan,

⁸⁰ Data Domografi Desa Tanjung Mompang 2018.

karena pendidikan sebagai salah satu system yang menompang lahirnya keberdayaan.

Sebenarnya di desa ini banyak sekali masyarakatnya yang punya semangat ingin melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi kemampuan secara ekonomi lemah sehingga kesempatan untuk melanjutkan studi tidak ada. Maka semangat tersebut menjadi kandas di perjalanan. Pemberdayaan dibidang pendidikan memang salah satu sasaran yang sangat strategis karena menyangkut persoalan kemajuan dan kemunduran bagi kelompok masyarakat di desa Tanjung Mompang. Pembagian beasiswa adalah salah satu kepedulian terhadap pendidikan yang umumnya masyarakat keluarga prasejahtera.

Sarana dan prasarana pendidikan terbilang sangat kurang. Di desa Tanjung Mompang terdapat satu Sekolah Dasar (SD). dan satu MDA, sedangkan lembaga pendidikan seperti TK/TPA, SMP, SMA/SLTA dan pondok pesantren tidak ada sama sekali sehingga masyarakat yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terpaksa

harus keluar dari desa Tanjung Mompang dan jelas memerlukan biaya yang lebih besar, sementara kondisi ekonomi masyarakat berada di garis kemiskinan.⁸¹ Inilah salah satu kendala masyarakat Tanjung Mompang sehingga kebanyakan para pemuda yang seharusnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lebih memilih merantau.

Adapun tentang jenis, status, jumlah gedung, jumlah tenaga pendidik, dan jumlah murid sangatlah kurang. Jika untuk meningkatkan kualitas pendidikan apalagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang keagamaan guna untuk membentuk masyarakat yang Islami berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Maka kondisi seperti ini harus menjadi sasaran pemberdayaan oleh lembaga keagamaan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaannya masing-masing dalam upaya pemberdayaan umat beragama pada bidang pendidikan. Karena dalam bidang pendidikan akan berpengaruh besar dalam perubahan sosial menuju kepada

⁸¹Hasil wawancara dengan Sulpan Lubis, Kepala desa Tanjung Mompang, 20 Juni 2020.

masyarakat yang sejahtera. Kurangnya pemberdayaan dalam pendidikan agama akan berpengaruh dalam pembentukan pribadi masyarakat di Desa Tanjung Mompang sehingga pendidikan menjadi strategis kedudukannya dalam mengantarkan masyarakat ke gerbang kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Mompang.⁸²

Jumlah ini sangat sulit untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang membanggakan bagi dunia pendidikan yang terdapat di desa Tanjung. Kondisi ini tentu akan menghasilkan kualitas pendidikan yang rendah mengingat jumlah anak usia sekolah selalu meningkat dan jumlah sarana tetap saja tak bertambah.

Kondisi seperti ini akan berdampak pada tingkat perkembangan penduduk. Maka dengan demikian kualitas pendidikan sangat rendah dan perubahan sosial kearah yang lebih maju sangatlah sulit untuk dicapai jika sarana dan prasarana pendidikan tidak diberdayakan. Kondisi pendidikan tentunya akan sangat berpengaruh dalam perkembangan pada

⁸²Data Monografi Desa Tanjung Mompang 2018.

masyarakat di Desa Mompang karena minat dari siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sangat minim.

Kondisi pendidikan yang berbasis keagamaan di Desa Mompang sangat memprihatinkan lagi di mana jumlah sarana dan prasarana yang ada hanya 1 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dengan tenaga pendidik 4 orang, sedangkan jumlah siswa hanya 141 orang. Maka minat masyarakat untuk mencari ilmu agama di lembaga pendidikan agama untuk membina akhlak masyarakat belum diperhatikan secara maksimal, pada hal bidang ini berakibat dalam perkembangan dan perubahan untuk pembangunan yang berlangsung di Desa Tanjung Mompang.

E. Situasi Sosial Adat dan Budaya

Situasi sosial dan budaya masyarakat Tanjung Mompang sama halnya dengan situasi sosial dan budaya mandailing. Memahami situasi sosial Mandailing, dapat dilihat pada sistem sosial dan budaya yang telah tertata dan berlangsung dalam masyarakat. Nilai-nilai sosial-budaya itu secara struktural dan fungsional terdapat pada sistem

kekerabatan Dalihan Na Tolu (tiga tungku) yang berdiri pada posisinya masing-masing dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dari sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu inilah sistem budaya (cultural system), sistem sosial (social system), dan sistem keperibadian (personality system) dibangun dan dikembangkan.⁸³

Pada waktu kolonial Belanda memasuki kawasan Mandailing (1837/1838 M), dalam masyarakat masih terdapat stratifikasi sosial. Raja sebagai pemimpin tritorial di wilayahnyadibantu anak boru dan didampingi oleh mora sebagai penasehat. Dalihan Na Tolu sebagai badan legislatif terdiri dari kahanggi, anak boru, mora, dan hatobangon yaitu, para sesepuh dancerdik cendekiawan yang arif dan bijaksana. Dalam kepemimpinanhuta (kampung) bahwa sistem kehidupan masyarakat tradisionalMandailing terdapat komposisi sosial kepada tiga macam, yakni; 1) kepemimpinan huta, 2) kepemimpinan ripe, dan 3) status kependudukan.

⁸³H.P. Panggabean, *Pembinaan NilaiAdat Budaya Batak Dalihan Natolu*, (Jakarta: Dian Utama, 2007), h. 31

Komposisi jabatan pemerintahan adat di atas hanya berfungsi sebagai pembagian kerja jika terjadi peristiwa yang terkait dengan masyarakat luas, karena masa dahulu sering terjadi konflik atau peperangan antar wilayah yang melibatkan rakyatnya, dan bagi yang kalah dalam peperangan harus tunduk kepada yang menang. Komposisi jabatan yang cukup banyak ini, secara juridis formal sulit untuk memahami pembagian kerja karena lingkup suatu kampung tidak begitu kompleks. Setidaknya, mekanisme kehidupan pemerintahan adat ini berlaku sebelum kawasan Mandailing dikuasai oleh kolonial Belanda, dan sebelum agama Islam berkembang dalam masyarakat.

Sistem kekerabatan orang Mandailing tetap menganut patrilineal, di mana hubungan kekerabatan mereka dapat ditinjau berdasarkan pertalian darah dan perkawinan yang terpola. Dalam hal ini, orang Mandailing mengelompokkan diri ke dalam tiga kelompok kekerabatan yang menjadi tumpuan dasar dari berbagai aktivitas sosial-budaya mereka. Menurut adat-istiadat, ketiga kelompok kekerabatan itu

masing-masing berkedudukan sebagai mora (kelompok pemberi anak gadis), anak boru (kelompok penerima anak gadis), dan kahanggi (kelompok kekerabatan yang se-marga), di mana ketiga kelompok kekerabatan tersebut terikat erat satu sama lain berdasarkan hubungan fungsional dalam satu sistem sosial yang dinamakan Dalian Natolu, yang artinya “tumpuan yang tiga” atau “tiga tumpuan”. Dengan menggunakan sistem sosial Dalian Natolu itulah orang Mandailing mengatur dan melaksanakan berbagai aktivitas sosial-budayanya, serta membentuk satu “persekutuan hukum” (*adatrechts gemeenschap*) yang nama aslinya adalah Janjian.

Selain ketiga kelompok kekerabatan mora, kahanggi dan anak boru tersebut di atas, orang Mandailing juga mengenal kelompok kekerabatan lain sebagai “kelompok kekerabatan tambahan” yang sebenarnya berasal dari ketiga kelompok kekerabatan inti (mora, kahanggi dan anak boru), yaitu mora ni mora (kelompok kekerabatan mora daripada mora) dan pisang raut atau kijang jorat (kelompok

kekerabatan anak boru daripada anak boru). Di samping itu ada pula kelompok kekerabatan yang disebut kahanggi pareban, yaitu kelompok kekerabatan yang terdiri dari beberapa “keluarga batih” yang berlainan marga namun mereka sama-sama atau merupakan anak boru dari satu keluarga yang ber-marga tertentu.⁸⁴

Berdasarkan pertalian darah terdapat kelompok kekerabatan yang dinamakan saompu parsadaan (satu nenek moyang yang sama), saompu (satu kakek), sabagas (se-
rumah), saudon (se-periuk) dan saama-saina (se-ayah dan se-
ibu). Kelompok kekerabatan yang disebut saompu adalah kelompok orang-orang se-marga yang merupakan cucu dari beberapa orang ompung (kakek) yang bersaudara kandung; sabagas adalah sejumlah anak se-marga yang bersaudara kandung; saudon adalah kumpulan orang-orang se-marga yang merupakan cucu dari seorang ompung (kakek); dan sama-saina adalah kumpulan sejumlah anak dari pasangan

⁸⁴Wawancara Pribadi Penulis dengan Syafi'i Tanjung tokoh adat Masyarakat, di Desa Tanjung Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, 15 Juni 2020.

ayah dan ibu kandung namun di dalamnya tidak termasuk “anak tiri” dan “anak angkat”. Sedangkan berdasarkan hubungan perkawinan dikenal pula istilah kouw, yaitu kelompok orang yang tidak se-marga dengan seseorang, yang merupakan kelompok kekerabatan mora (mora ni mora) maupun anak boru (kijang jorat). Dalam hubungan ini, ada pula istilah “koum-sisolkot” yang terbentuk dari kata “koum” dan “sisolkot”, yang masing-masing mengandung makna klasifikasi dalam konteks sistem kekerabatan. Sedangkan sisolkot berarti orang-orang yang se-marga, yang adakalanya disebut markahanggi atau marsisolkot. Oleh sebab itulah, sistem sosial orang Mandailing yang dinamakan adat Dalian Natolu itu juga disebut adat Markouw-Sisolkot.⁸⁵

Dalam prakteknya, meskipun orang Mandailing sekarang umumnya telah memeluk agama Islam sebagai tuntunan hidup, namun mereka masih tetap mengamalkan dan melaksanakan adat-istiadat lama Dalian Natolu sebagai warisan para leluhur. Pada setiap upacara adat perkawinan

⁸⁵*Ibid.*,

(disebut markaroan boru atau marbagas) misalnya, baik pada tahap-tahapan upacara adat perkawinan dan pelaksanaannya, orang Mandailing masih tetap memfungsikan sistem sosial Dalian Natolu. Hal ini tampak sangat jelas ketika mereka (kelompok kekerabatan mora, kahanggi, dan anak boru) melakukan kegiatan adat markobar (berpidato adat) dan marpokat (musyawarah adat) untuk mencapai “kata sepakat” dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut. Demikian pula halnya dengan peran dan fungsi masing-masing kelompok kekerabatan dalam setiap tahapan dari pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut, mulai dari kegiatan adat mangaririt boru, manyapai boru, patibal sere, pokat menek, pokat godang, paboru-boruon atau marburangir, mata ni orja, patuaek boru, hingga kegiatan adat marulak ari atau mebat. Dalam setiap kegiatan adat markobar dan marpokat misalnya selalu dibuka dengan ucapan “Bismillahirrohmanirrohim” dan “Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh”, serta diakhiri atau ditutup dengan kegiatan berdo’a kehadirat Allah SWT, yang

dipimpin tokoh agama untuk memohon taufiq dan hidayah-Nya dengan harapan semoga upacara adat perkawinan yang akan mereka laksanakan bersama-sama tersebut dapat terselenggara semua tahapannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan adat-istiadat mereka yang sudah tidak lagi bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Pada upacara adat perkawinan di Mandailing di masa sekarang, memang kaum bangsawan orang Mandailing (disebut: *namora-mora*) masih sering menampilkan berbagai berbagai macam kesenian tradisional sebagai warisan para leluhur, seperti misalnya penggunaan ensambel musik adat *Gordang Sambilan*, tarian adat *Tortor* dan nyanyian adat *Jeir* yang diiringi dengan ensambel musik adat *Gondang Dua* (*Gondang Topap*). Namun kesemuanya itu sekarang sudah dipandang orang Mandailing sebagai kesenian (seni pertunjukan) yang berfungsi sebagai “hiburan”, meskipun pada dasarnya masih melekat fungsi lainnya yaitu untuk mempererat rasa persaudaraan antar sesama orang Mandailing. Sementara kalau pelaksanaan upacara adat

perkawinan di kalangan orang kebanyakan (disebut: alak na jaji atau si tuan na jaji), tidak jarang pula menampilkan kesenian Pan-Islam seperti Barzanji dan Dikir yang berfungsi sebagai hiburan, dan juga sekaligus dapat mempererat rasa persaudaraan mereka sesama muslim.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa Mandailing dengan kebudayaannya telah ada jauh sebelum datangnya Islam, bahkan juga telah ada sebelum agama Hindu memasuki wilayah Mandailing. Munculnya ungkapan "ombar do adat dohot ugamo" merupakan puncak dari persentuhan, perbenturan, penyesuaian dan perpaduan antara adat-istiadat lama (tradisional) Mandailing dengan agama Islam yang datang kemudian. Lahirnya ungkapan tersebut tidaklah muncul begitu saja, akan tetapi melalui suatu proses dalam masa yang cukup panjang, dan di dalam masa yang panjang itulah terjadi benturan antara adat-istiadat dan agama Islam. Benturan tersebut terjadi karena adat-istiadat orang Mandailing sudah memiliki tatanan kehidupan, baik itu secara individu maupun secara bermasyarakat. Sementara

agama Islam yang datang kemudian juga membawa tatanan di berbagai aspek kehidupan, yang menuntut ketaatan pula dari para pemeluknya. Dengan kedatangan Islam itu maka bertemulah dua tatanan kehidupan di dalam masyarakat Mandailing yang masing-masing menuntut kepatuhan dari penganut/pendukungnya, yang membuat adanya persentuhan intens yang saling tarik-menarik antara kepentingan adat-istiadat dan agama, sehingga pada akhirnya lahirlah ungkapan "ombar do adat dohot ugamo" di dalam masyarakat Mandailing.

BAB V

**ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MALIM
KAMPUNG DAN HATOBANGON PADA MASYARAKAT
DESA TANJUNG MOMPANG
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Formulasi Hakam Pada Masyarakat Desa Tanjung
Mompang dalam Menyelsaikan Perselisihan Suami Istri**

Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga.⁸⁶ Itulah sebabnya jika antara suami isteri terdapat pertentangan pendapat dan pertengkaran yang memuncak sehingga kedua belah pihak tidak mungkin dapat mengatasinya dan tidak mungkin pula mendamaikannya sendiri, maka dapat diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak isteri. Kasus krisis rumah tangga yang memuncak ini dalam istilah fiqh disebut *syiqaq*.⁸⁷

⁸⁶Muhammad Alwi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nidham al-Usrah*, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, (Yogyakarta: Agung Lestari, 1993), h. 87.

⁸⁷Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), h. 86.

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini bisaanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Bila terjadi konflik keluarga seperti ini, Allah SWT member petunjuk untuk menyelesaikannya.⁸⁸ Hal ini terdapat dalam firman-Nya pada surat an-Nisa (4) ayat 35 yang bunyinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu mengkhawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. (QS. An-Nisa': 35)".

Penunjukan *hakam* dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan

⁸⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 194.

untuk menyelesaikan persengketaan di antara dua belah pihak suami dan istri. Apabila karena sesuatu hal, *hakam* yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk *hakam* lainnya. Dalam hal ini, di Indonesia dikenal sebuah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas *hakam (arbitrator)* untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa, atau dalam hal-hal tertentu memberi nasihat calon suami istri yang merencanakan perkawinan.

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi *hakam* tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi 'Atha' dan salah satu pendapat dari Imam al-Syafi'i, menurut satu hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang *hakam* itu adalah sebagai wakil dari suami istri.

Dalam kedudukan ini dua orang *hakam* tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan

tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri; keduanya telah dewasa dan cerdas; oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.⁸⁹

Begitu juga dengan pemahaman masyarakat desa Tanjung Mompang memahami betapa pentingnya mempertahankan sebuah pernikahan. itulah sebabnya adat masyarakat Tanjung Mompang mengatur tentang tata caranya untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar salah satunya melalui hakam dan muswarah kekeluargaan.

Dalam pemahaman masyarakat Tanjung Mompang ketika terjadi percekocokan antara suami istri akan diselesaikan sebagaimana ketentuan fikih, mulai dari dinasehati, dibelakangi waktu tidur, dipisahkan dari tempat tidur dan dipukul jika memang belum juga selesai. Jika

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 196.

belum juga membaik, suami istri masih juga berselisih maka akan dipanggillah hakam untuk mendamaikannya. artinya masyarakat Tanjung Mompang juga melaksanakan ajara islam dalam menyelesaikan perselisihan suami istri.

Hakam dalam masyarakat Tanjung Mompang terdiri dari perwakilan dari pihak keluarga suami istri dan ditambah dengan *malim kampung* dan *Hatobangon* Hatobangon diikutsertakan dalam formulasi hakam karena *hatobangon* dianggap mempunyai pengetahuan dan wawasan sekitar hukum keluarga baik secara agama dan adat.⁹⁰

B. Kewenangan *Malim Kampung dan Hatobangon* Memutuskan Cerai Bagi Suami Istri yang Sedang Berselisih Pada Masyarakat Desa Tanjung Mompang

Proses perceraian Yang terjadi pada masyarakat desa Tanjung Mompang pada umumnya dilakukan di bawah tangan. Dalam hal ini *Malim Kampung dan Hatobangon* sebagai hakam/ mediator memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang berselisih jika tidak bisa di

⁹⁰ Muhammad Rais, *Malim Kampung desa Tanjung Mompang*, Wawancara pribadi, Tanjung Mompang, Agustus 2020.

damaikan lagi. Fakta hukum seperti ini kerap ditemukan di desa tanjung Mompang karena pada umumnya perceraian yang terjadi pada daerah ini 70 % dilakukan dibawah tangan. Hanya masyarakat yang PNS sajalah yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama.⁹¹

Masyarakat desa Tanjung Mompang merupakan masyarakat yang taat terhadap adat dan norma yang berkembang dalam masyarakat sehingga tokoh agama dan tokoh adat (*Hatobangon*) masih sangat dihormati. Bagi masyarakat desa Tanjung Mompang *hatobangon* (tokoh masyarakat baik dalam masalah adat maupun agama) merupakan orang yang mampu dan bijaksana dalam memutuskan permasalahan terutama masalah perkawinan, sehingga jika ada terjadi masalah dalam rumah tangga penyelesaiannya akan dilakukan secara adat.⁹²

⁹¹Mara Saman Lubis, Tokoh adat Tanjung Mompang, Wawancara Pribadi, Tanjung Mompang 2020.

⁹² Inpun, Tokoh masyarakat desa Tanjung Mompang, Wawancara Pribadi, Tanjung Mompang 2020.

Hakam dalam masyarakat desa Tanjung Mompang terdiri dari satu atau dua orang dari pihak laki-laki (suami) dan satu atau dua orang dari pihak perempuan (istri) serta *Malim Kampung dan Hatobangon*. Hakam dari pihak suami dan istri akan berkumpul dengan suami istri yang sedang berselisih, jika tidak ditemukan solusi dalam perselisihan tersebut akan maka selanjutnya hakam akan meminta *hatobangon* untuk turut mendamaikannya jika tidak bisa didamaikan lagi maka hakam akan memutuskan cerai antara suami dan istri.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syahidal, ia menjelaskan bahwa *hatobangon* bisa memberi keputusan untuk bercerai terhadap suami istri yang berselisih apabila tidak bisa didamaikan.⁹⁴

Hal senada dengan pernyataan di atas juga di Sampekan oleh Ompu Zulfan. Menurut Zulfan hukum islam

⁹³Malim Parlindungan, tokoh masyarakat desa Tanjung Mompang, Wawancara Pribadi, Tanjung Mompang. 2020.

⁹⁴ Syahidal, Hatobangon desa Tanjung Mompang, Wawancara pribadi. Agustus 2020.

telah menetapkan Hakam bagi pasangan suami istri yang berselisih, tujuan penetapan hakam itu pada dasarnya adalah untuk mencari jalan damai antara suami istri yang berselisih. Namun dalam banyak kasus banyak perselisihan rumah tangga masyarakat yang membuat mereka tidak bisa bersama dan berdamai, sehingga pada acara mendamaikan suami istri yang biasanya dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga akan terlihat dengan terang benderang apa kemauan suami istri. Sehingga musyawarah tersebut akan mengambil keputusan cerai jika tidak dapat disatukan kembali.⁹⁵

Lebih lanjut menurut Arjon bahwa *hatobangon* dan *malim kampung* merupakan orang yang sangat dihormati, perannya sangat penting bagi masyarakat, sebab merekalah yang memberikan nasehat bagi masyarakat dalam segala permasalahan hidup termasuk perselisihan rumah tangga. Menurut Arjon *Hatobangon* berperan sebagai hakim bagi masyarakat. Ketika terjadi masalah biasanya diselesaikan

⁹⁵Ompu Zulfan, *Hatobangon pada Masyarakat Desa Tanjung Mompang*. Wawancara pribadi. Juni 2020.

berdasarkan musyawarah dan keputusan dalam musyawarah adalah yang terbaik dan akan dilaksanakan.⁹⁶

Masih menurut Arjon, ia menjelaskan bahwa dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga maka *hatobangon* memiliki peran yang sangat penting. Arjon menuuturkan bahwa *hatobangon* adalah orang-orang yang sangat penting dalam mendamaikan keluarga yang bermasalah, bahkan dalam musywarah *hatobangon* bisa memberi keputusan berpisah atau cerai ketika tidak bisa didamaikan kembali.⁹⁷

Sudirman Lubis juga menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat *hatobangon dan malim kampung* memiliki kewenangan memutuskan masalah masyarakat. Misalnya dalam pembagian waris *hatobangon dan malim kampung* biasanya membagi bagian setiap ahli waris begitu juga dalam permasalahan lainnya *hatobangon dan malim kampung* akan memberi keputusan. Menurut Sudirman *hatobangon dan malim kampung* boleh memberi

⁹⁶ Arjon, otokoh Masyarakat desa tanjung Mompang, wawancara pribadi. Juni 2020.

⁹⁷ *Ibid.*,

keputusan cerai bagi suami istri yang berselisih. Sudirman menjelaskan bahwa banyak kasus suami istri yang terjadi yang apabila tidak diselesaikan maka akan mendatangkan kemudharatan bagi anak dan keluarganya, maka sesuai dengan adat kebiasaan apabila ada permasalahan suami istri maka pihak keluarga akan mendamaikannya, jika mereka tidak bisa mendamaikannya maka akan dimintak bantuan *hatobangon dan malim kampung* untuk menyelesaikannya. Lebih jelasnya Sudirman mengatakan bahwa *hatobangon dan malim kampung* memiliki hak untuk memberi keputusan cerai apabila dinilai bahwa cerai merupakan jalan terbaik.⁹⁸

C. Pandangan Masyarakat Desa Tanjung Mompang Tentang Kewenangan Hakam Dalam Menceraikan Suami Istri Yang Sedang Berselisih

Proses perceraian pada masyarakat desa Tanjung Mompang umumnya dilakukan dibawah tangan. Dalam hal ini, bagi masyarakat Tanjung Mompang hakam sebagai mediator memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang

⁹⁸ Sudirman Lubis, *Tokoh Masyarakat Tanjung Mompang*, Wawancara pribadi. Juni 2020.

berselisih jika tidak bisa di damaikan lagi. Fakta hukum seperti ini kerap ditemukan di desa Tanjung Mompang karena pada umumnya perceraian yang terjadi pada daerah ini 75 % dilakukan dibawah tangan. Hanya masyarakat yang PNS sajalah yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama.⁹⁹

Masyarakat desa Tanjung Mompang merupakan masyarakat yang taat terhadap adat dan norma yang berkembang dalam masyarakat sehingga tokoh agama ('Alim Ulama) dan tokoh adat (*Hatobangon*) masih sangat dihormati.¹⁰⁰ Bagi masyarakat desa Tanjung Mompang *hatobangon* (tokoh masyarakat baik dalam masalah adat maupun agama) merupakan orang yang mampu dan bijaksana dalam memutuskan permasalahan terutama masalah perkawinan, sehingga jika ada terjadi masalah dalam rumah tangga penyelesaiannya akan dilakukan secara adat.¹⁰¹

⁹⁹ Mara Saman Hasibuan, Tokoh adat (mantan kepala desa) Tanjung Mompang, wawancara Pribadi, Tanjung Mompang 04 Juni 2020.

¹⁰⁰ Inpun Harahaf, Tokoh masyarakat Desa Tanjung Mompang, kecamatan Tanjung Mompang, Wawancara Pribadi, Tanjung Mompang Juli 2020.

¹⁰¹ M. Sa'id, Tokoh masyarakat desa Tanjung Mompang, wawancara pribadi, Tanjung Mompang Mei 2020.

Parlindungan menjelaskan, hakam dalam masyarakat desa Tanjung Mompang terdiri dari satu atau dua orang dari pihak laki-laki (suami) dan satu atau dua orang dari pihak perempuan (istri). Hakam dari pihak suami dan istri akan berkumpul dengan suami istri yang sedang berselisih, jika tidak ditemukan solusi dalam perselisihan tersebut akan maka selanjutnya hakam akan meminta *hatobangon* untuk turut mendamaikannya jika tidak bisa didamaikan lagi maka hakam akan memutuskan cerai anantara suami dan istri.¹⁰²

Dalam hal ini, bagi masyarakat Tanjung Mompang hakam sebagai mediator memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang berselisih jika tidak bisa didamaikan lagi.¹⁰³

Selanjutnya, Sutan Ahmad menjelaskan, kewenangan hakam dalam memutuskan cerai pada suami istri yang sedang berselisih sudah ada dan diamalkan masyarakat sejak dulu.

¹⁰²Malim Parlindungan, Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Mompang, Wawancara Pribadi, Tanjung Mompang . Mei 2020.

¹⁰³Hasil Wawancara Dengan Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Mompang kecamatan Panyabungan Utara, Mei 2020.

Sutan meyakini bahwa kewenangan hakim dalam memutuskan perceraian saat terjadi perselisihan yang patal antara suami istri sudah ada sejak dari nenek moyang mereka, konsep penyelesaian perceraian oleh hakim pada masyarakat Tanjung Mompang merupakan warisan dari nenek moyang mereka, sebab masyarakat Tanjung Mompang adalah masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan sebelum Islam datang dan juga masyarakat Tanjung Mompang merupakan masyarakat yang taat terhadap hukum adat istiadat yang ada.¹⁰⁴

D. Faktor Yang Melatarbelakangi Pemahaman Masyarakat Desa Tanjung Mompang Tentang Kewenangan *Malim Kampung dan Hatobangon* dalam Memutus Cerai Pada Suami Istri Yang Berselisih

Sebagaimana dijelaskan oleh Inpun Harahap masyarakat desa Tanjung Mompang merupakan masyarakat yang taat terhadap adat dan norma yang berkembang dalam masyarakat sehingga tokoh agama ('Alim Ulama) dan tokoh

¹⁰⁴Sutan Ahmad, Tokoh Agama masyarakat Tanjung Mompang, wawancara Pribadi, Tanjung Mompang, Agustus 2020.

adat (*Hatobangon*) masih sangat dihormati.¹⁰⁵ Sehingga bagi masyarakat desa Tanjung Mompang *hatobangon* (tokoh masyarakat baik dalam masalah adat maupun agama) merupakan orang yang mampu dan bijaksana dalam memutuskan permasalahan terutama masalah perkawinan, sehingga jika ada terjadi masalah dalam rumah tangga penyelesaiannya akan dilakukan secara adat.¹⁰⁶

Sebagaiman telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, proses perceraian pada masyarakat desa Tanjung Mompang umumnya dilakukan dibawah tangan. pada umumnya perceraian yang terjadi pada daerah ini 70 % dilakukan dibawah tangan. Hanya masyarakat yang PNS sajalah yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan desa Tanjung Mompang merupakan desa yang berada di pedalaman dan pegunungan.

¹⁰⁵Inpun Harahaf, Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Mompang, kecamatan Tanjung Mompang, Wawancara Pribadi, Tanjung Mompang Juli 2020.

¹⁰⁶ *Ibid.*,

Masyarakat desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara merupakan masyarakat yang taat terhadap adat dan budaya yang telah mereka anut secara turun temurun sehingga tokoh agama dan tokoh adat (*Hatobangon*) masih sangat dihormati. Bagi masyarakat desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara *hatobangon* (tokoh masyarakat baik dalam masalah adat maupun agama) merupakan orang yang mampu dan bijaksana dalam memutuskan permasalahan terutama masalah perkawinan, sehingga jika ada terjadi masalah dalam rumah tangga penyelesaiannya akan dilakukan secara adat.¹⁰⁷

Masyarakat desa Tanjung Mompang yang merupakan keturunan dari suku Muara Sipongi, asal muasal masyarakat desa Tanjung Mompang adalah masyarakat yang pindah dari wilayah Muara Sipongi ke Tanjung Mompang. Mulanya masyarakat ini sedikit, namun lama kelamaan tumbuh dan bertambah banyak hingga menjadi sebuah Masyarakat dan desa. Masyarakat desa Tanjung Mompang adalah masyarakat

¹⁰⁷ Inpun, Tokoh Adat Masyarakat Desa Tanjung Mompang, wawancara pribadi, Tanjung Mompang, Juli, 2020.

yang tertutup, dan menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa Mandailing. Hampir semua perkawinan dilakukan antar sesama masyarakat, dengan kata lain tidak ada masyarakat desa Tanjung Mompang yang menikah dengan masyarakat desa lain kecuali dalam beberapa tahun belakangan ini dan itu pun masih dalam jumlah yang sangat sedikit.

Faktor lain yang menyebabkan fenomena ini adalah karena daerah ini merupakan daerah pedalaman, desa ini terletak di pegunungan. akses masuk ke desa ini melalui kelurahan Mompang Jae dengan jarak tempuh 9 km dengan kondisi jalan tanah dan batu sedangkan armada pengangkutan yang digunakan ke desa ini *colt Diesel* 100 PS dan taff Badak. Kondisi ini dapat dipahami dengan kondisi jalan yang masih tanah dan bebatuan serta menanjak tinggi, sehingga tidak semua jenis mobil/angkutan bisa masuk desa ini. Kondisi geografis seperti ini menjadi salah satu penyebab sosialisasi bebrbagi aturan perundang-undangan khususnya dalam perkawinan sehingga tidak heran banyak perkawinan

yang tidak di catat dan banyak perceraian yang dilakukan di bawah tangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terapat beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya kewengang *malim kampung dan Hatobnagon dalam* memutus cerai bagi suami istri yang berselisih, anatra lain:

1. Faktor geografis. Letak geografis desa Tanjng Mompang yang berada di pegunungan dan pedalaman membuat masyarakat terbiasa menyelsaikan segala permasalahan yang terjadi sesuai dngan pemahaman dan kapasitas masyarakat
2. Sifat yang tertutup. Sifat tertutup masyarakat desa tanjung Mompang mengakibatkan lambatnya perkembangan hukum, ketertutupan masyarakat ini juga menghambat perkembangan informasi terkait peraturan perundang-undangan khususnya dalam masalah perceaian.

3. Adat turun temurun. Adat turun temurun yang sampai sekarang masih diamalkan membuat posisi *malim kampung dan Hatobangon* pada masyarakat Desa Tanjung Momopang semakin tinggi, sehingga ucapannya, tingkah lakunya dan keputusan yang dibuat oleh *malim kampung dan Hatobangon dianggap* sebagai solusi terbaik.
4. Kurangnya Perhatian pemerintah. Letak geografis dan akses masuk yang sulit serta faktor sosial lainnya turut menjadi penyebab kurangnya perhatian, pengawasan dan sosialisasi dari pemerintah terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan perkawinan dan perceraian terhadap masyarakat Desa tanjung Mompang, sehingga hal ini berakibat ketertinggalan masyarakat Tanjung Mompang dalam melaksanakan perkawinan dan perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan dan perceraian.

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat Desa Tanjung Mompang merupakan masyarakat yang tertutup, dan jarang melakukan interaksi dengan masyarakat luas. Hal ini menjadi faktor penyebab masyarakat Desa Tanjung Mompang terbiasa hidup sendiri dan menyelesaikan segala persoalan sosial dengan sendiri, maksud sendiri disini tidak berarti sendirian namun sendiri yang dimaksudkan disini hanya sesama penduduk desa. dalam pelaksanaan hukum khususnya dalam proses penyelesaian perselisihan rumah tangga masyarakat desa Tanjung Mompang tidak bisa terlepas dari adat istiadat yang ada. Hal ini disebabkan masyarakat Tanjung Mompang telah mempunyai hukum yang mapan dan berlaku dimasyarakat. Dalam perjalanannya masyarakat desa Tanjung Mompang memiliki banyak kearifan dalam penyelesaian permasalahan sosial yang terjadi ditenga-tengah masyarakat.

Dalam kajian hukum, masyarakat dapat melakukan pilihan, seperti pada masalah perkawinan, kecenderungan pilihan mematuhi hukum Islam masyarakat Tanjung

Mompang bukan semata-mata kepahaman mereka terhadap hukum tersebut, melainkan percampuran antara pemahaman, tradisi, dan keteladanan.¹⁰⁸

Pelaksanaan hukum oleh masyarakat yang lebih cenderung memilih dan mentaati hukum adat dibandingkan hukum Islam dan hukum Positif lebih diwarnai ketentuan adat khususnya pada penyelesaian sengketa antara suami istri yang berselisih.

E. Analisa Terhadap Kewenangan Hakam dalam Memutuskan Cerai Bagi Suami Istri Yang Sedang Berselisih Pada Masyarakat Desa Tanjung Mompang Ditinjau Hukum Islam

Sebagaimana telah dijelaskan paa bab sebelumnya bahwa dalam Hukum islam apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan

¹⁰⁸Keteladanan yang dimaksud adalah keteladan *malim kampung* dan *Paradat* (ustad kampung dan tokoh adat). Hampir setiap kampung memiliki ustad dan tokoh adat-nya, hal ini secara tidak langsung menjadi simbol keberagamaan kehidupan masyarakat kampung tersebut. Sehingga bisalah kita katakan bahwa jika ingin mengetahui karakter masyarakat kampung itu lihat dan Tanya saja dengan ustad yang ada dikampung tersebut (*sapai ma malim I kampungi*)

maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak.

Kedua hakam ini tentunya hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri. Hakam tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua hakam tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu.

Pendapat Imam al Syafi'i yang menganggap hakam tidak memiliki wewenang untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih adalah sejalan syari'at Islam yang membenci perceraian meskipun sebagai perbuatan yang halal. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله)¹⁰⁹

Artinya: "Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim)."

Dalam penafsiran Imam al-Syafi'i bahwa surat an-Nisa ayat 35 ini mengisyaratkan dibolehkannya hakam mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami istri untuk bercerai. Jadi apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak.

¹⁰⁹ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkâm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 225. Lihat Juga al-Baqiy, h. 650

Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5 yang dijadikan alasan Imam al-Syafi'i di atas jika dihubungkan dengan penafsiran para ahli tafsir, di antaranya Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî dalam *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, ada keterangan bahwa ulama fiqih mengatakan, apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang artinya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya. Jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si perempuan dan seorang yang dipercaya dari kaum laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang sedang bersengketa itu. Kemudian keduanya melakukan hal yang lebih maslahat baginya menurut pandangan keduanya, antara berpisah atau tetap bersatu sebagai suami istri. Akan tetapi, imbauan syariat

menganjurkan untuk tetap utuh sebagai suami istri.¹¹⁰ Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya:

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada

suami istri itu. (QS. An-Nisa: 35).¹¹¹

Sejalan dengan tafsir Ibnu Katsir, maka Ahmad Mustafâ Al-Marâgî dalam *Tafsîr al-Marâgî* menyatakan dengan ini dapat diketahui, betapa Allah sangat memperhatikan hukum-hukum tatanan keluarga dan rumah tangga. Mengapa Allah tidak menyebutkan perceraian? Itu karena Allah membencinya dan karena Dia ingin menyadarkan kepada kaum Muslimin bahwa hal itu tidak patut terjadi.¹¹²

Ayat di atas sudah cukup menjadi petunjuk tentang pentingnya *hakam*. Islam melarang perceraian yang bisa menghancurkan masa depan anak dan kedua belah pihak. Itulah

¹¹⁰ Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, terj. Bahrûn Abu Bakar, (Bandung: Sinar baru algensindo, 2003), h. 115.

¹¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama 1986), h. 123.

¹¹² Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî*, Jilid 5, Terj. Bahrûn Abu Bakar, Hery Noer Ally, Anshari Umar Sitanggal, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1993), h. 47.

sebabnya jika antara suami isteri terdapat pertentangan pendapat dan pertengkaran yang memuncak sehingga kedua belah pihak tidak mungkin dapat mengatasinya dan tidak mungkin pula mendamaikannya sendiri, maka dapat diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak isteri.

Dalam kaitannya dengan pendapat Imam al-Syafi'i, bahwa menurutnya, kedua hakam tidak boleh menyuruh suami isteri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami isteri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu. Adapun data atau keterangan yang mendukung pendapat Imam al-Syafi'i yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah beserta para pengikut berpendapat bahwa kedua juru damai itu tidak boleh mengadakan pemisahan atau perceraian, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan atau perceraian tersebut kepada kedua juru damai.¹¹³

Dalam kaitannya dengan pemahaman dan budaya masyarakat Tanjung Mompang tentang kewenangan *Malim Kampung dan hatobangon* isebagai hakam dalam memutuskan cerai bagi suami atau isteri yang berselisih,

¹¹³ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, h. 249.

hakam sebagai mediator memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang berselisih jika tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini disebabkan masyarakat Tanjung Mompang merupakan masyarakat yang taat dengan hukum dan penyelesaian perceraian dalam budaya masyarakat Tanjung Mompang sudah diamalkan sejak dulu.

Meskipun masyarakat Tanjung Mompang merupakan masyarakat yang menganut mazhab Sayafi'I akan tetapi dalam hal kewenangan seorang hakam dalam memutus cerai bagi suami istri yang sedang berselisih tidak sejalan dengan mazhab Syafi'I, akan tetapi bukan berarti bahwa pemahaman dan budaya masyarakat Tanjung Mompang bertentangan dengan syariat.

Kaitannya dengan hal ini, budaya/“*adat*” masyarakat Tanjung Mompang mengenai kewenangan hakam penulis coba mendekatkannya dengan salah satu metode *ijtihad* yang dijadikan ulama sebagai instrumen untuk mengistinbath hukum. Adapun kaidah yang berkaitan dengan itu adalah:

العادة المحكمه¹¹⁴

Artinya : “adat kebisaan itu ditetapkan sebagai hukum”

Alasan ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap adat tersebut adalah berdasar kepada hadits yang berasal dari Abdullah ibn Mas‘ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن¹¹⁵

Artinya: “Apa yang dipandang ummat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka hal tersebut di sisi Allah adalah baik”

Berdasarkan kaidah diatas, penulis berkesimpulan bahwa budaya msyarakat Tanjung Mompang tentang kewenangan *Malim Kampung dan hatobangon* sebagai hakam dalam memutuskan cerai merupakan aturan/ hukum adat yang tidak mempunyai legalitas dan tidak bertentangan dengan sejumlah ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

¹¹⁴ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, h. 94.

¹¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, h. 376.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam rangkaian pembahasan yang sudah di paparkan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam pemahaman dan budaya masyarakat desa Tanjung Mompang hakam sebagai mediator bagi suami istri yang sedang berselisih memiliki kewenangan untuk memutuskan cerai suami istri yang berselisih jika tidak bisa di damaikan lagi.

Pemahaman masyarakat Tanjung Mompang tentang kewenangan hakam dalam memutuskan cerai bagi suami istri yang sedang berselisih dan tidk bisa didamaikan lagi dilator belakanginya oleh ketaan masyarakat Tanjung Mompang terhadap adat istiadat para pendahulu adat. peraktek penyelesaian perceraian secara adat pada masyarakat Tanjung Mompang dipicu oleh berbagai faktor baik geografis maupun

faktor sosilogis sehingga perceraian dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat. Kondisi seperti ini membuat kedudukan hakam sebagai juru damai pada masyarakat Tanjung Mompang jadi tinggi dan keputusannya ditaati dan dihormati, sehingga para *malim kampung dan hatobangon* yang bertindak sebagai hakam hakam memiliki kewenangan dalam memutuskan perceraian antara suami istri yang berselisih.

Dalam hukum Islam hakam hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua hakam tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu.

Meskipun masyarakat Tanjung Mompang merupakan masyarakat yang menganut mazhab Sayafi'i akan tetapi dalam hal kewenangan seorang hakam dalam memutus cerai

bagi suami istri yang sedang berselisih tidak sejalan dengan mazhab Syafi'i.

B. Saran

Di akhir penulisan skripsi ini, penulis berupaya memberikan beberapa saran dan harapan, baik yang diperuntukkan kepada akademik maupun masyarakat yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada sarjana-sarjana hukum Islam agar lebih meningkatkan kualitas keilmuan dan mengembangkan keterampilan untuk menggali kembali kitab-kitab fiqh sekaligus menganalisis agar kiranya memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat, serta menghubungkannya dengan kondisi kekinian sehingga tidak terjadi kebakuan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

2. Kemudian kepada masyarakat khususnya masyarakat Tanjung Mompang diharapkan lebih bijak memilah dan memilih dalam mengamalkan adat istiadat yang telah ada, jika adat itu merupakan adat yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum hendaklah masyarakat menjaga adat tersebut, karena adat itu merupakan bagian hukum. Namun jika suatu adat bertentangan dengan hukum Islam maka hendaklah tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang mumpuni dibidangnya meluruskannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam dan bisa dijadikan sebagai hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dâr al- Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Abu Daud, *Suan Abu Daud*, Juz III, Beirut Muassat al-Risalah, 2000.
- Abul A'la Maududi, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, Terj. Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", Jakarta: anggota IKAPI, 1991.
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkâm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'î' wa al-Shana'î'*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Terj. Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, Surabaya: Balai Buku,t.th.
- Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Sayyid Abi Bakr (al-Sayyid al-Bakr), *I'ânât al-Thâlibîn*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.th.

- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz. II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Arjon, Tokoh Masyarakat Tanjung Mompang, Wawancarapribadi. Tanjung Mompang, Juli 2020.
- Badan Statistik Mandailing Natal, *Madaina Dalam Angka 2018*.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2003.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Hamid Shadiq Qinyabiy, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ', 'Arabiy-Ingliziy Divorce Repudiction*, Riyadh: Dar al-Nafa'is, 1988.
- Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, " Keluarga Muslim", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.
- Ibn Manzbur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1992.

- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-Alamin*, Bairut: Daar al-Fikr, t.th.
- Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.
- Inpun, Tokoh Masyarakat Tanjung Mompang, Wawancara pribadi. Tanjung Mompang, Juli 2020.
- M. Sa'id, Tokoh Masyarakat Tanjung Mompang, Wawancara pribadi. Tanjung Mompang, Juli 2020.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990.
- Malim Parlindungan, Tokoh Agama Masyarakat Tanjung Mompang, Wawancara pribadi. Tanjung Mompang, Juli 2020.
- Mara Saman. Tokoh Agama Masyarakat Tanjung Mompang, Wawancara pribadi. Tanjung Mompang, Juli 2020.
- Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Muhammad Alwi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nidham al-Ushrah*, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993.
- Muhammad al-Zarqa`, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus, Dar al-Qalam, 1996.

- Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Muhammad Fu`ad Abd al-Baqiy, *Sunan Ibn Mâjah*, Beirut al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.
- Muhammad Rais, Tokoh Masyarakat Tanjung Mompang, Wawancara pribadi. Tanjung Mompang, Juli 2020.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970.
- Syahidal, Tokoh Masyarakat Tanjung Mompang, Wawancara pribadi. Tanjung Mompang, Juli 2020.
- Sudriman, Tokoh (*Hatobangon*) Masyarakat Tanjung Mompang, Wawancara pribadi. Tanjung Mompang, Juli 2020.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Sumber data Administrasi Kecamatan Panyabungan Utara, tanggal 10 September 2019.
- Sutan Ahmad, Tokoh Masyarakat Tanjung Mompang, Wawancara pribadi. Tanjung Mompang, Juli 2020.
- Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama 1986.